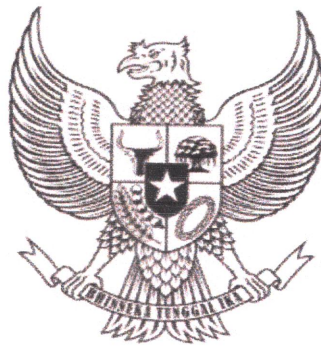


LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
BIDANG SOSIAL BUDAYA
TAHUN 2023



RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Perubahan Renstra yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun tersebut, renja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di Tahun 2023 sesuai dengan amanat Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami berharap Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Renja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, 29 Juli 2022
Inspektur Daerah
Kabupaten Karanganyar,



ZULFIKAR HADIDH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19750311 199903 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Salinan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2022.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	32
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2021.....	13
Tabel 2.2	
Perkiraan Hasil Rencana Kerja Tahun 2022.....	18
Tabel 2.3	
Review Terhadap Rancangan Awal RKP 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	22
Tabel 2.4	
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Karanganyar	26
Tabel 3.1	
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kerja 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Karanganyar	36
Tabel 3.2	
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	41
Tabel 4.1	
Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematis dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Renja memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dalam rangka mencapai visi misi Kepala Daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintah daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Renja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Lembaga pengawas internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Renja yang disusun juga berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Inspektorat Daerah. Selain itu, penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mengacu pada prinsip - prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahunan juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk resiko - resiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan beresiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Tata cara penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah termaktub dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Dengan Renja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Maka penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dimana Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Karanganyar akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Karanganyar. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selain itu, Renja juga menggambarkan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Terakhir, Renja adalah sebagai wadah sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat Daerah;
5. Agar Inspektorat Daerah mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Renja ini diuraikan secara singkat dalam masing-masing sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Renja, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam penyusunan renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bagian ini akan dijabarkan realisasi, capaian serta analisis dari Renja tahun sebelumnya, faktor-faktor penghambat tercapainya target serta kebijakan-kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Tahun 2022 yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, dan penjelasan temuan

2.5 dari hasil perbandingan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Inspektorat Daerah tidak langsung berhubungan dengan usulan dan program kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

Pada bagian ini menjabarkan tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan program pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran dengan jumlah program dan kegiatan.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Inspektorat Daerah 2018-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjabarkan tentang rencana kerja dan pendanaan dalam satu tahun anggaran.

BAB V Penutup

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Perumusan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 didahului dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Renja Tahun 2021.

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil evaluasi target kinerja 2021 dapat menilai efektifitas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Rincian pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.368.868.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.755.747.177,00 atau 91,68% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan capaian terlaksananya kegiatan administrasi persuratan selama 12 bulan.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian jumlah tagihan yang terbayarkan sebanyak 36 tagihan.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian terlaksanakannya pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional sebanyak 24 STNK yang terdiri dari 11 Unit kendaraan roda empat dan 13 Unit kendaraan roda dua.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian terpenuhinya kegiatan administrasi kesekretariatan berupa pembelian bahan ATK.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian terpenuhinya kegiatan administrasi kesekretariatan berupa pembayaran bahan fotocopy, penggandaan dan penjilidan.

- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan pembayaran upah jasa tenaga kebersihan.
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan capaian tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah.
- h. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan capaian tersedianya kebutuhan logistik kantor berupa gula pasir, teh, kopi, air, dll selama 12 bulan.
- i. Penyediaan makanan dan minuman, dengan capaian tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah, dengan capaian terlaksananya perjalanan rapat koordinasi ke luar daerah berupa laporan perjalanan dinas.
- k. Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah dengan capaian tersusunnya arsip surat masuk, surat keluar dan SK dalam bentuk *hardcopy*.

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.217.141.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.004.177.685,00 atau 82,50% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan terhadap 16 OPD sesuai dengan PKPT;
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian terlaksanakannya pemeriksaan komprehensif sesuai dengan PKPT.
- c. Pengawasan Desa yang dilaksanakan terhadap 32 Desa;
- d. Reviu Laporan Keuangan yang meliputi :
 - 1) Review Dokumen Perencanaan, dengan capaian terciptanya laporan hasil reviu RKA/RKA Perubahan SKPD, RKPD dan RKPD Perubahan.
 - 2) Review Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK, dengan capaian terciptanya laporan hasil reviu Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Dana Desa Serta DAK.

- 3) Review Laporan Keuangan Daerah, dengan capaian berupa pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 kali dengan 1 Laporan Hasil Reviu.
- e. Reviu Laporan Kinerja dengan capaian terciptanya laporan LAKIP OPD yang dievaluasi, reviu LKJiP dan reviu LPPD;
- f. Kerjasama Pengawasan Internal;
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- h. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- i. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 248.645.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 175.234.967,00 atau 70,48% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan capaian Peningkatan Kapabilitas APIP level 3;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan capaian Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) dan Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan;
- c. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), dengan capaian berupa pelaksanaan evaluasi atas dokumen rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap 24 SKPD;
- d. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan capaian berupa :
 - 1) LHKPN dan LHKASN, dengan capaian berupa terlaksananya verifikasi terhadap pegawai yang melaporakan LHKPN dan LHKASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 kali;
 - 2) Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi;
 - 3) Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi.

- f. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan capaian berupa Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas dan Survey Penilaian Integritas.

Untuk Tahun 2022, pandemi covid sudah mulai berkurang, bahkan peraturan peraturan sudah mulai agak memberi kelonggaran dalam penerapannya. Belajar dari tahun 2022 untuk Rencana Kerja Tahun 2022 mulai disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tahun 2021. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.357.957.500,00 untuk melaksanakan 3 program dan 36 sub kegiatan. Sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 dari alokasi anggaran yang ada sudah terelisasi sebesar Rp.3.242.715.295.603 dengan capain fisik 38,8 %.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2022) pada Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Insepktorat Daerah, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 pada sebagai berikut :

Tabel 2.1
EVALUASI RIKPD INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	Kode Rekening	Program/Kegiatan RIKPD Permendagri 13	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/9	12	13 = (8+10-12)	14 = (13/7)
	6	Usaha Pemerintahan Pungai Pemanjang	Unsur Pengawasan Usaha Pemerintahan										
1.	6 01	Pegawasan	Inspektorat Daerah										
A.	6 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penguji Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	78	79,09	76	79,41	104,49	77	235,5	98,72
	6 01 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tahun	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
	6 01 01 2 01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya rencana strategis, rencana kerja, tujuan dan indikator kinerja yang terukur dan jelas	Dokumen Renstra dan Renja/Renja Perubahan	2	0	0	0	0,00	2	2	100,00
	6 01 01 2 01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RIKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen CALK	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
	6 01 01 2 01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya laporan kinerja perangkat daerah dan laporan pelaksanaan tugas	LPT LKPD	2	0	0	0	0,00	2	2	100,00
	6 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
	6 01 01 2 06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan alat kebersihan	Buah	1 Paket 450 Buah	1 Paket 407 Buah	1 Paket 407 Buah	1 Paket 407 Buah	100,00	1 Paket 420 Buah	1 Paket 1234 Buah	93,33
	6 01 01 2 06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik kantor	Buah/Kg/Dos	1 Paket 1.750 Buah/Kg/Dos	1 Paket 1.595 Buah/Kg/Dos	1 Paket 1.595 Buah/Kg/Dos	1 Paket 1.595 Buah/Kg/Dos	100,00	1 Paket 1.600 Buah/Kg/Dos	1 Paket 4.790 Buah/Kg/Dos	91,42
	6 01 01 2 06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah tabung LPG	Tabung	3 Tabung	3 Tabung	3 Tabung	3 Tabung	100,00	3 Tabung	72 Tabung	85,71
	6 01 01 2 06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Paket	1 Paket 175.000 lembar	1 Paket 135.000 lembar	1 Paket 135.000 lembar	1 Paket 135.000 lembar	100,00	1 Paket 150.000 lembar	1 Paket 410.000 lembar	85,71
	6 01 01 2 06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jasa penggandaan	Paket	175.000 lembar	135.000 lembar	135.000 lembar	135.000 lembar	100,00	150.000 lembar	410.000 lembar	85,71
	6 01 01 2 06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jasa pengijlidan	Paket	175.000 lembar	135.000 lembar	135.000 lembar	135.000 lembar	100,00	150.000 lembar	410.000 lembar	85,71
	6 01 01 2 06 07	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Bahan/Material kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Paket	175.000 lembar	135.000 lembar	135.000 lembar	135.000 lembar	100,00	150.000 lembar	410.000 lembar	85,71
	6 01 01 2 06 08	Penyediaan makanan dan minuman	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Paket	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00
	6 01 01 2 06 08	Penyediaan makanan dan minuman	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Snack dan Makan	Dos	1500 dos snack, 1500 dos makan, 100 snack dan jamuan tamu	1500 dos snack, 1500 dos makan	1100 dos snack, 1100 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu	1100 dos snack, 1100 dos makan, 60 snack dan jamuan tamu	100,00	1500 dos snack, 1500 dos makan, 100 snack dan jamuan tamu	4100 dos snack, 4100 dos makan, 150 snack dan jamuan tamu	100,00
	6 01 01 2 06 09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
	6 01 01 2 06 10	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya penatausahaan arsip	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00
	6 01 01 2 06 10	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya penatausahaan arsip	THL	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00

6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Pemangung Usaha Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00	
6	01	01	2.03	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket Terselenggaranya pengadaan benda pos Jumlah THL	Benda Pos Orang	170 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	130 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	150 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	150 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	100,00	170 Benda Pos 12 Bulan 2 THL	450 Benda Pos 36 Bulan 6 THL	100,00	
6	01	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00	
6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangung Usaha Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00	
6	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 yang siap pakai Terpeliharanya sepeda motor yang siap pakai	Roda 4 Roda 2	11 13	11 13	11 13	100,00	11 13	33 39	100,00	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
6	01	01	2	09	06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor	Paket	1	1	1	100,00	1	3	100,00	
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung, jaringan listrik dan sanitair Jumlah THL Jumlah Tenaga Kebersihan	Paket THL Tenaga kebersihan	1 1 1	1 1 1	1 1 1	100,00	1 1 1	3 3 3	100,00	
6	01	01	2	09	10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Paket	1	1	1	100,00	1	3	100,00	
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangung Usaha Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Tahun	1	1	1	1	100,00	1	3	100,00	
6	01	01	2	07	05	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya mebeleur	Paket	0	1	0	0	100,00	1	2	100,00
6	01	01	2	07	07	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1	1	100,00	0	2	100,00	
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dinas operasional kantor	Unit	0	1	0	0	100,00	0	1	100,00
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor	Paket	1	1	0	0	100,00	0	1	100,00
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Bulan	12	12	12	12	100,00	12	36	100,00	
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen yang telah terverifikasi	bulan	12	12	12	100,00	12	36	100,00	
6	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen yang telah terverifikasi	dokumen	12	12	12	100,00	12	36	100,00	
6	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Tersusunnya laporan akuntansi sesuai SAP	Dokumen Laporan Keuangan Daerah	12	12	12	100,00	12	36	100,00	
6	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Laporan Akutabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Daerah	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1	1	1	100,00	1	3	100,00	
6	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terwujudnya 12 Laporan bulanan dan 2 laporan semesteran	Dokumen	14	14	14	100,00	14	42	100,00	
6	01	01	2	02	02	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	PAK	80	52	48	48	100,00	72	172	90,00

6	01	02	2.01	01	07	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Pelaksanaan LAEWASDA Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Inventarisasi temuan pengawasan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Kepuasan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Obrik atau Temuan oleh BPK/BPKP/Inspektoriat Prov Jumlah THI	42 3	42 3	42 3	42 3	100,00	42 3	126 9		
						Pengembangan manajemen pelaksanaan kebijakan RDH		Jumlah kebijakan RDH	Rajian	-	16	16	16	100,00	16	48		
6	01	02	2	02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100,00	100	300		
6	01	02	2	02	01			Benar-benar Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	Presentase Laporan Jumlah kerugian negara	Kasus	20	0	18	100,00	18	36		
6	01	02	2	02	03			Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah tindak lanjut atas temuan pemeriksaan khusus	IHP	10	40	10	10	100,00	10	60
C	6	01	03				Program Forumasi Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Presentase tingkat keadaban pelaporan kecapaian Pejabat Negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level teridentifikasi 3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100	100	100,00	100	300		
									%	100	76	76	76	80	232			
									%	100	100	100	100	100	300			
									%	100	100	100	100	100	300			
6	01	03	2	01			Forumasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terciptanya kebijakan pendampingan dan asistensi yang baik	%	100	100	100	100,00	100	300			
6	01	03	2	01	01			Peningkatan Kapabilitas APSP	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peningkatan level kapabilitas APSP	Level	3	3	3	100,00	3	106	
6	01	03	2	01	01			Fasilitas Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Daerah (e-Warda)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	PKPT	1	1	1	1	100,00	1	3
6	01	03	2	02				Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	%	100	100	100	100	100,00	100	300	
6	01	03	2	02	01			Pendampingan dan Asistensi Urusan Daerah Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	OPD	OPD Seluruh Kab Kra	OPD Seluruh Kab Kra	OPD Seluruh Kab Kra	OPD Seluruh Kab Kra	100,00	OPD Seluruh Kab Kra	OPD Seluruh Kab Kra
6	01	03	2	02	02			Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	OPD	12	12	16	100,00	16	42	
6	01	03	2	02	03			Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi LHKRN dan LHKARN Fasilitas Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemutihan Jumlah THI	Laporan	7	7	7	100,00	7	21	
6	01	03	2	02	04			Survey Penilaian Integritas Fasilitas dan Persiapan Zona Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kegiatan	1	1	1	1	100,00	1	3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Di dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Selain itu, disebutkan bahwa struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari terdapat 7 jabatan struktural terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon II.b, 5 (lima) jabatan eselon III.a, dan 3 (tiga) jabatan eselon IV.a.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2020 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Merujuk pada norma dan standar pelayanan pada BPKP dan APIP lainnya. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
1.	Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3	2,634	Na	Na	3	3	
2.	Level Kapabilitas APIP	Level	Na	3	3	3	3	3	Na	Na	3	3	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa risiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi organisasi dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga harus dapat berperan sebagai pemberi konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat

Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mendukung Misi kelima dari Kepala Daerah yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, Sosial budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah raga, diharapkan dengan teratasinya permasalahan yang ada bisa menghasilkan hasil yang maksimal sehingga bisa mendukung RPJMN khususnya meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas serta mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terkait dengan penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan.

Identifikasi isu - isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP;
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah.

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat Daerah ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan

dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3. Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat Daerah telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganya.
2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.

Dibandingkan dengan rancangan awal RKPD 2022, maka RENJA tahun 2023 tidak ada perbedaan dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan

RAPBD Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian amat penting untuk menyusun RENJA SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Inspektorat Daerah				10.382.253.000	Inspektorat Daerah				10.382.253.000	
	A.1. Belanja Operasi				10.357.253.000	A.1. Belanja Operasi				10.357.253.000	
	Belanja Pegawai				6.204.253.000	Belanja Pegawai				6.204.253.000	
	Belanja Barang Jasa				4.153.000.000	Belanja Barang Jasa				4.153.000.000	
	A.2. Belanja Modal				25.000.000	A.2. Belanja Modal				25.000.000	
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	Inspektorat Daerah Daerah				10.382.253.000	Inspektorat Daerah Daerah				10.382.253.000	
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Capaian Nilai SAKIP	78	7.507.253.000	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Capaian Nilai SAKIP	78	7.507.253.000	
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	20.000.000	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renja dan Perubahan Renja) Renstra	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renja dan Perubahan Renja) Renstra	4.000.000	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen (LPT dan LKPD)	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen (LPT dan LKPD)	4.000.000	
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12.000.000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	100%	6.240.253.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	100%	6.240.253.000	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	6.204.253.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	6.204.253.000	
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	70 PAK	20.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	70 PAK	20.000.000	
3)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	4.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah	Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	4.000.000	
4)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.500.000	
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	3.500.000	

c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	100%	225.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	100%	225.000.000
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Terwujudnya APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	12 Bulan	225.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah	Terwujudnya APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	12 Bulan	225.000.000
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	417.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	417.000.000
1)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Terpenuhi kebutuhan perlengkapan pencegahan kebakaran	1 Paket 3 Tabung	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Terpenuhi kebutuhan perlengkapan pencegahan kebakaran	1 Paket 3 Tabung	25.000.000
2)	Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket logistik yang disediakan Jumlah tabung LPG yang disediakan	1 Paket 24 Tabung	25.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Daerah	Jumlah paket logistik yang disediakan Jumlah tabung LPG yang disediakan	1 Paket 24 Tabung	25.000.000
3)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	60.000.000
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	2.000.000
5)	Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket	85.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Daerah	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket	85.000.000
6)	Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah	Jumlah Makan dan Minum Kecil Jumlah Makan Perseorangan Jumlah Jamuan Tamu	1500 dos 1500 dos 100 pak	85.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah	Jumlah Makan dan Minum Kecil Jumlah Makan Perseorangan Jumlah Jamuan Tamu	1500 dos 1500 dos 100 pak	85.000.000
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	12 bulan	85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	12 bulan	85.000.000
8)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah	Terselenggaranya penatausahaan arsip Jumlah THL	12 bulan 1 Orang	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah	Terselenggaranya penatausahaan arsip Jumlah THL	12 bulan 1 Orang	50.000.000
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	28.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	28.000.000
1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	28.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	28.000.000
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	260.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	260.000.000
6)	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat Daerah	Jumlah paket benda pos yang disediakan Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket Jumlah THL	1 Paket 12 Bulan 1 Orang	50.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat Daerah	Jumlah paket benda pos yang disediakan Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket Jumlah THL	1 Paket 12 Bulan 1 Orang	50.000.000
6)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat Daerah	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	12 bulan	210.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat Daerah	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	12 bulan	210.000.000

g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	320.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	320.000.000
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	200.000.000
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	40.000.000
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah THL	1 paket 2 Orang	88.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah THL	1 paket 2 Orang	88.000.000
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 paket	26.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah	Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 paket	26.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Karanganyar	1. Presentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berakumulasi pada kegiatan negara atau daerah; 2. Presentase hasil temuan pemeriksaan atau ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan; 3. Presentase tidak lanjut dengan rekomendasi; 4. Presentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti; 5. Presentase LHR LKPD dan OPD	98% 10% 95% 100% 1	3.100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Karanganyar	1. Presentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berakumulasi pada kegiatan negara atau daerah; 2. Presentase hasil temuan pemeriksaan atau ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan; 3. Presentase tidak lanjut dengan rekomendasi; 4. Presentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti; 5. Presentase LHR LKPD dan OPD	98% 10% 95% 100% 1	3.100.000.000
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obyek dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	1.900.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obyek dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	1.900.000.000
1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 LHP	200.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 LHP	200.000.000
2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	86 LHP	350.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	86 LHP	350.000.000
3)	Revisi Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi Jumlah revisi LKJP Jumlah revisi LPPD	41 LHR 1 LHR 1 LHR	100.000.000	Revisi Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi Jumlah revisi LKJP Jumlah revisi LPPD	41 LHR 1 LHR 1 LHR	100.000.000
4)	Revisi Laporan Keuangan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Hasil Revisi DAK Jumlah Hasil Revisi LKPD dan LK OPD Jumlah Hasil Revisi RKA/RKAP Jumlah Hasil Revisi RKPD/RKPD Perubahan	24 LHP 11 LHP 41 LHP 41 LHP	250.000.000	Revisi Laporan Keuangan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Hasil Revisi DAK Jumlah Hasil Revisi LKPD dan LK OPD Jumlah Hasil Revisi RKA/RKAP Jumlah Hasil Revisi RKPD/RKPD Perubahan	24 LHP 11 LHP 41 LHP 41 LHP	250.000.000
5)	Pengawasan Desa	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 LHP	250.000.000	Pengawasan Desa	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 LHP	250.000.000
6)	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan pertanggungjawaban dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar Terseleksi secara rapat koordinasi	12 Laporan 12 Bulan	250.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan pertanggungjawaban dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar Terseleksi secara rapat koordinasi	12 Laporan 12 Bulan	250.000.000
7)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Obrek Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP Jumlah THL Luwanda	41 Obrek 4 Orang	500.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Obrek Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP Jumlah THL Luwanda	41 Obrek 4 Orang	500.000.000
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obyek dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	200.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obyek dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	200.000.000
1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Audit Investigasi Jumlah Kerugian Negara/Daerah	20 Kasus	100.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Audit Investigasi Jumlah Kerugian Negara/Daerah	20 Kasus	100.000.000
2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu	10 Kegiatan	100.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu	10 Kegiatan	100.000.000

3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab Karanganyar	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi 3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100% 100% 100%	775.000.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kab Karanganyar	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi 3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100% 100% 100%	775.000.000	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	Terciptanya kebijakan pendampingan dan asistensi yang baik	100%	170.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	Terciptanya kebijakan pendampingan dan asistensi yang baik	100%	170.000.000	
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level 3	70.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level 3	70.000.000	
2)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	PKPT	100.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	PKPT	100.000.000	
b	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	605.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	605.000.000	
1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	41 Perangkat Daerah	150.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	41 Perangkat Daerah	150.000.000	
2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	55.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	55.000.000	
3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi	7 Laporan 3 THL	300.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi	7 Laporan 3 THL	300.000.000	
4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Kegiatan	100.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Karanganyar	Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Kegiatan	100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar hanya membuat program dan kegiatan lingkup pembinaan dan pengawasan regular melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi, masyarakat dapat mengajukan laporan melalui pengaduan masyarakat atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 ayat (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada ayat (4). Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat

pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kelembagaan daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan daerah kabupaten/kota, pembangunan daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Sampai saat ini Inspektorat Daerah sudah melaksanakan pengawasan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional diantaranya peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Saber Pungli dan Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana

kerja pemerintah daerah. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah : “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi, Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 Misi Pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Sedangkan untuk prioritas unggulan yang dirumuskan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 10 program unggulan tersebut yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat : pelatihan tentang demokrasi tentang pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di Kabupaten / Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintergrigasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan stratup untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi misal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung / irigasi;
8. Pembukaan kawasan industry baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan insfrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Kebijakan Nasional dan Propinsi tersebut yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Visi adalah gambaran dan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun mendatang

untuk periode Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Visi tersebut adalah **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Daerah, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah **Misi Kelima Bupati terpilih yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**. Pengertian Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup peningkatan kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Di samping itu juga memerlukan kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, transparan dan Akuntabel, akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Karanganyar untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Karanganyar yang makmur, sejahtera dan damai (dengan akhlak yang mulia).

Dalam hal mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian internal mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan sesuai peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner*, untuk mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN dan mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah, Pelaksanaan

Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi yaitu:

1. Perencanaan Program Pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Berdasarkan dokumen Perubahan RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Mengacu pada grand design 8 area perubahan pada reformasi birokrasi yaitu :

a. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi kementerian / lembaga / pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompentensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari

program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah fokus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan, dan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme, maka dalam Perubahan RENSTRA 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah **“Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas”** dengan indikator tujuan Maturitas SPIP.

2. Sasaran

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu meningkatnya Kapabilitas APIP. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KERJA 2018-2023
INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal	Target Program dan Kegiatan					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas SPIP	1.	Level Kapabilitas APIP	Na	3	3	3	3	3	3

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan visi Kepala Daerah yaitu “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” ada 5 misi dari Bupati / Wakil Bupati guna melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karanganyar yaitu:

- a. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
- b. Pemberdayaan perekonomian rakyat
- c. Pendidikan gratis SD/SMP/SMA dan kesehatan gratis
- d. Pembangunan Desa sebagai pusat pertumbuhan
- e. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Dari misi yang telah di tetapkan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah terdapat pada misi kelima yaitu “Peningkatan kualitas keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga” dengan arah kebijakan Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Fasilitasi desa mandiri dan berkembang;
- b. Masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif;
- c. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak;
- d. Perlindungan, pelestarian, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah;
- e. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul;
- f. Pengembangan inovasi dan prestasi daerah;
- g. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 dapat dijelaskan melauai uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - 2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Penyediaan Bahan/Material;
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya.

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal;
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi.
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;

- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan seluruh target kegiatan yang akan dilaksanakan sudah diperhitungkan dengan matang dan sesuai dengan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Karanganyar

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1		2				3	4	5	6	7	8	9	10	
						Inspektorat Daerah			#####				16.097.000.000	
						A.1. Belanja Operasi			#####				16.047.000.000	
						Belanja Pegawai			6.204.253.000				9.200.000.000	
						Belanja Barang Jasa			4.153.000.000				6.847.000.000	
						A.2. Belanja Modal			28.000.000				50.000.000	
6						Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
6	01					Inspektorat Daerah Daerah			#####				16.097.000.000	
6	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur 3. Presentase tertib pelaporan keuangan 4. Capaian Nilai SAKIP	Inspektorat Daerah		7.507.253.000	DAU			12.267.000.000
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Inspektorat Daerah	100%	20.000.000	DAU	100%	100%	32.000.000
6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	2 Dokumen (Renja dan Perubahan Renja) Renstra	4.000.000	DAU		2 Dokumen (Renja dan Perubahan Renja) Renstra	12.000.000
6	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	2 Dokumen (LPT dan LKPD)	4.000.000	DAU		2 Dokumen (LPT dan LKPD)	10.000.000

6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Inspektorat Daerah	100%	225.000.000	DAU	100%	100%	500.000.000	
o	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terwujudnya APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	Inspektorat Daerah	12 Bulan	225.000.000	DAU		12 Bulan	500.000.000	
6	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	100%	417.000.000	DAU	100%	100%	1.158.000.000	
6	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pencegahan kebakaran	Inspektorat Daerah	1 Paket 3 Tabung	35.000.000	DAU		1 Paket 3 Tabung	100.000.000
6	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan Jumlah tabung LPG yang disediakan	Inspektorat Daerah	1 Paket 24 Tabung	25.000.000	DAU		1 Paket 24 Tabung	150.000.000
6	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Inspektorat Daerah	1 Paket	60.000.000	DAU		1 Paket	100.000.000
6	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah	12 Bulan	2.000.000	DAU		12 Bulan	10.000.000
6	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Inspektorat Daerah	1 paket	85.000.000	DAU		1 paket	175.000.000
6	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Kecil Jumlah Makan Perseorangan Jumlah Lunas Tamu	Inspektorat Daerah	1500 dos 1500 dos 100 pax	85.000.000	DAU		1500 dos 1500 dos 100 pax	220.000.000
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	Inspektorat Daerah	12 bulan	85.000.000	DAU		12 bulan	350.000.000
6	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terseleenggaranya penatausahaan arsip Jumlah THL	Inspektorat Daerah	12 bulan 1 Orang	50.000.000	DAU		12 bulan 1 Orang	50.000.000
6	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	100%	25.000.000	DAU	100%	100%	50.000.000	
6	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Inspektorat Daerah	1 Paket	25.000.000	DAU		1 Paket	50.000.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	100%	260.000.000	DAU	100%	100%	525.000.000	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket benda pos yang disediakan Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket Jumlah THL	Inspektorat Daerah	1 Paket 12 Bulan 1 Orang	50.000.000	DAU		1 Paket 12 Bulan 1 Orang	125.000.000	
o	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet	Inspektorat Daerah	12 bulan	210.000.000	DAU		12 bulan	400.000.000	

6	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	100%	320.000.000	DAU	100%	100%	675.000.000	
6	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Inspektorat Daerah	24 Unit	300.000.000	DAU		24 Unit	350.000.000
6	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Inspektorat Daerah	1 paket	40.000.000	DAU		1 paket	100.000.000
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah THL	Inspektorat Daerah	1 paket 2 Orang	55.000.000	DAU		1 paket 2 Orang	150.000.000
6	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Inspektorat Daerah	1 paket	25.000.000	DAU		1 paket	75.000.000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Kabupaten Karanganyar		1. Presentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah; 2. Presentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan; 3. Presentase tindak lanjut dengan rekomendasi; 4. Presentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti; 5. Presentase LHR LKPD dan OPD	2.100.000.000	DAU		1. Presentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah; 2. Presentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan; 3. Presentase tindak lanjut dengan rekomendasi; 4. Presentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti; 5. Presentase LHR LKPD dan OPD	2.925.000.000
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Karanganyar	100%	1.900.000.000	DAU	100%	100%	2.675.000.000	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	16 LHP	200.000.000	DAU		16 LHP	500.000.000	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	56 LHP	350.000.000	DAU		56 LHP	475.000.000	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi Jumlah reviu LKJP Jumlah reviu LPPD	Inspektorat Daerah	41 LHR 1 LHR 1 LHR	100.000.000	DAU		41 LHR 1 LHR 1 LHR	125.000.000	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Hasil Reviu DAK Jumlah Hasil Reviu LKPD dan LK OPD Jumlah Hasil Reviu RKA/RKAP Jumlah Hasil Reviu RKP/RKPD Perubahan	Kabupaten Karanganyar	24 LHP 11 LHP 41 LHP 41 LHP	250.000.000	DAU		24 LHP 11 LHP 41 LHP 41 LHP	375.000.000	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Karanganyar	32 LHP	250.000.000	DAU		32 LHP	350.000.000	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar Terselenggaranya rapat koordinasi	Kabupaten Karanganyar	12 Laporan 12 Bulan	250.000.000	DAU		12 Laporan 12 Bulan	300.000.000	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Obrik Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP Jumlah THL Larvasida	Kabupaten Karanganyar	41 Obrik 4 Orang	500.000.000	DAU		41 Obrik 4 Orang	650.000.000	

6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Karanganyar	100%	200.000.000	DAU	100%	100%	250.000.000
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Audit Investigasi Jumlah Kerugian Negara/ Daerah	Kabupaten Karanganyar	20 Kasus	100.000.000	DAU		20 Kasus	100.000.000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Karanganyar	10 Kegiatan	100.000.000	DAU		10 Kegiatan	150.000.000
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Kab Karanganyar	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi 3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	775.000.000	DAU		1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN 2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi 3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	905.000.000
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terciptanya kebijakan pendampingan dan asistensi yang baik	Inspektorat Daerah	100%	170.000.000	DAU	100%	100%	300.000.000
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peningkatan level kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah	Level 3	70.000.000	DAU		Level 3	100.000.000
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah	PKPT	100.000.000	DAU		PKPT	200.000.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kabupaten Karanganyar	100%	605.000.000	DAU	100%	100%	605.000.000
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Inspektorat Daerah	41 Perangkat Daerah	150.000.000	DAU		41 Perangkat Daerah	80.000.000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karanganyar	10 Perangkat Daerah	55.000.000	DAU		10 Perangkat Daerah	75.000.000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi	Kabupaten Karanganyar	7 Laporan 3 THL	300.000.000	DAU		7 Laporan 3 THL	200.000.000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Karanganyar	1 Kegiatan	100.000.000	DAU		1 Kegiatan	250.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam usulan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 diproyeksi bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Proyeksi pendanaan tersebut merupakan usulan SKPD yang bersumber dari dokumen perencanaan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcomes*)/kegiatan (*output*) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2023	Prakiraan Maju 2024	Keterangan Prioritas Pembangunan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	INSPEKTORAT DAERAH																
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78						10.382.253.000	#####				
6	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78								
6	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	4.000.000	12.000.000	
6	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	12.000.000	10.000.000	
6	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	4.000.000	10.000.000	
6	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78				Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	6.240.253.000	9.330.000.000	

6	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	6.204.253.000	9.200.000.000	
6	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	70 PAK	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	20.000.000	90.000.000	
6	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Tersedianya pejabat Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	4.000.000	10.000.000	
6	01	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	5.000.000	10.000.000	
6	01	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	3.500.000	10.000.000	
6	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	3.500.000	10.000.000	

6	01	001	2.02		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	12 bulan	225.000.000	500.000.000	
6	01	001	2.02	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Terwujudnya AIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	12 bulan	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	12 bulan	225.000.000	500.000.000	
6	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	417.000.000	1.155.000.000	
6	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pencegahan kebakaran	1 Paket 3 Tabung	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	25.000.000	100.000.000	
6	01	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah tabung LPG yang disediakan	1 Paket 24 Tabung	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		25.000.000	150.000.000	
6	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	60.000.000	100.000.000	

6	01	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	2.000.000	10.000.000	
6	01	001	2.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	85.000.000	175.000.000	
6	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Jamuan Tamu Jumlah Makan Perseorangan Jumlah Minum dan Makan Kecil	100 pax 1500 Box 1500 Box	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	85.000.000	220.000.000	
6	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Terseenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	12 bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	85.000.000	350.000.000	
6	01	001	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah THL Terseenggaranya penatausahaan arsip	1 Orang 12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	50.000.000	50.000.000	

6	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	25.000.000	50.000.000
6	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	25.000.000	50.000.000
6	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	260.000.000	528.000.000
6	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah paket benda pos yang disediakan Jumlah THL	1 Paket 1 Orang 12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	50.000.000	125.000.000
6	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telepon, dan internet	12 Bulan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	210.000.000	400.000.000
6	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78			Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	320.000.000	675.000.000
6	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	200.000.000	350.000.000
6	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang pelihara	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	40.000.000	100.000.000
6	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah THL	1 Paket 2 Orang	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	55.000.000	150.000.000
6	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 Paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	25.000.000	75.000.000

6	01	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP	78	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaaan	98%			3.100.000.000	2.925.000.000	
										Persentase hasil temuan pemeriksaaan atau ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	10%					
										Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	95%					
										Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	100%					
										Jumlah LHR LKPD	1 LHR LPPD					
6	01	002	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100%	1.900.000.000	2.675.000.000		
6	01	002	2.01	001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 LHP	100%	200.000.000	300.000.000		
6	01	002	2.01	002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	36 LHP	100%	350.000.000	475.000.000		
6	01	002	2.01	003 Revisi Laporan Kinerja	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi	41 LHR	100%	100.000.000	125.000.000		
										Jumlah revisi LK-IP	1 LHP					
										Jumlah revisi LPPD	1 LHP					
6	01	002	2.01	004 Revisi Laporan Keuangan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Hasil Revisi DAK	24 LHP	100%	250.000.000	275.000.000		
										Jumlah Hasil Revisi LKPD dan LK OPD	11 LHP					
										Jumlah Hasil Revisi RKA/RKAP	41 LHP					
										Jumlah Hasil Revisi RKPD/RKPD Perubahan	41 LHP					
6	01	002	2.01	005 Pengawasan Desa	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 LHP	100%	250.000.000	350.000.000		
6	01	002	2.01	006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar	12 Laporan	100%	250.000.000	300.000.000		
										Terselenggaranya rapat koordinasi	12 Bulan					

6	01	002	2.01	007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Obrik Hasil Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP	41 Obrik 4 Orang	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	500.000.000	650.000.000	
6	01	002	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah THL		Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	200.000.000	250.000.000	
6	01	002	2.02	001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Audit Investigasi Jumlah Kerugian Negara/Daerah	20 Kasus	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100.000.000	100.000.000	
6	01	002	2.02	002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu	10 Kegiatan	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100.000.000	150.000.000	
6	01	003			PROGRAM PERUMUBAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	100%				775.000.000	905.000.000	
									Persentase SKPD yang telah menerapkan SIP pada level terdefinisi	100%						
									Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%						
6	01	003	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Terwujudnya kebijakan teknis dibidang fasilitas pengawasan	100%	170.000.000	300.000.000	
6	01	003	2.01	001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Peningkatan level kapabilitas APIP	3 Level	Terwujudnya kebijakan teknis dibidang fasilitas pengawasan	100%	70.000.000	100.000.000	
6	01	003	2.01	002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1 PKPT	Terwujudnya kebijakan teknis dibidang fasilitas pengawasan	100%	100.000.000	200.000.000	

6	01	003	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	605.000.000	605.000.000	
6	01	003	2.02	001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	150.000.000	80.000.000	
6	01	003	2.02	002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 perangkat daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	55.000.000	75.000.000	
6	01	003	2.02	003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 Laporan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	300.000.000	200.000.000	
6	01	003	2.02	004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Terwujudnya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Kegiatan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	100%	100.000.000	250.000.000	

BAB V PENUTUP

Rencana kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan Perubahan RPJMD, disesuaikan dengan visi misi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Karanganyar yaitu **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

